

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Ide awal topik penelitian ini berangkat dari besarnya minat penulis terhadap kajian mengenai fenomena MDGs dalam hubungan internasional kontemporer. MDGs merupakan sebuah deklarasi yang menghimpun komitmen para pemimpin dunia untuk menangani isu perdamaian, keamanan, kemiskinan, pembangunan dan hak asasi. MDGs mengandung delapan tujuan yang dijadikan tolak ukur objektif bagi proses pembangunan di negara-negara berkembang di mana setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target dan disertai indikatornya, yang wajib dipenuhi pada tahun 2015.

Selain itu, dalam hubungan internasional, masalah lingkungan tidak dapat lagi dipandang sebelah mata. Masalah lingkungan bukan lagi sebuah mitos melainkan sebuah fakta yang harus diterima oleh semua negara apalagi mengingat terjadinya pemanasan global yang mana berakibat kepada meningkatnya suhu bumi. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup berdampingan dengan alam dan membawa dampak negatif yang amat dahsyat. Setiap tahun di Indonesia terus menerus mengalami bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Berapa banyak kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan oleh ulah manusia itu sendiri.

Alasan lain dari pemilihan judul ini adalah karena sejauh pengetahuan penulis, belum banyak tulisan yang membahas tentang Peran Millenium

Development Goals (MDGs), yang lebih spesifiknya dengan tujuan program MDGs yang ke-tujuh yaitu melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

Alasan tersebut yang di atas mendorong penulis tertarik untuk mengangkat **Peran Millennium Development Goals (MDGs) Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup di Indonesia** menjadi judul skripsi ini.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah agar penulis dapat mengetahui peran yang dilakukan MDGs khususnya dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia mengingat kedelapan tujuan MDGs tersebut harus dipenuhi pada tahun 2015. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana hasil pencapaian Program Sasaran Pembangunan Millenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) di Indonesia di bidang lingkungan hidup sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan agar sasaran MDGs pada tahun 2015 dapat tercapai.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan pembangunan negara tidak dapat dipisahkan dari salah satu tujuan yang ingin dicapai sebuah negara setelah mencapai kemerdekaan. Dalam mencapai tujuan pembangunan sebuah negara, perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Secara global, lingkungan hidup mulai menjadi isu utama di panggung dunia diawal tahun 80-an, saat itu dunia mulai melihat bahwa kebijakan

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilangsungkan oleh setiap negara dalam konteks pembangunan mulai memberikan dampak negatif yang sangat besar. Tingkat kehancuran lingkungan hidup yang terjadi sangat cepat dan dalam skala yang sangat besar sepertinya tidak mampu dibendung lagi, yang secara tidak langsung hal ini akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri.

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah memiliki perhatian yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara terus menerus. Pembangunan di Indonesia yang terus berlangsung hingga kini terus memberikan perhatian yang besar tanpa mengesampingkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan pendapatan dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif belakangan ini telah bertolak belakang dengan Deklarasi Rio, 1992 untuk Lingkungan dan Pembangunan dengan cetak biru Agenda-21 guna mencapai Pembangunan Berkelanjutan. Bumi tempat manusia hidup terus dirusak oleh mesin industri yang bias lingkungan.

Saat ini masalah lingkungan bukan lagi sebuah mitos melainkan sebuah fakta yang harus diterima oleh semua negara apalagi mengingat terjadinya pemanasan global, yang mana mengakibatkan meningkatnya suhu bumi. Wujud dari kepedulian dunia terhadap negara berkembang adalah dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di New York

pada bulan September 2000, yang diikuti oleh 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diikuti oleh kepala pemerintahan, sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium. Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs).

Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmennya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs.

MDGs mengandung delapan tujuan yang dijadikan tolak ukur objektif bagi proses pembangunan di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin terutama dalam upaya menjamin daya dukung lingkungan hidup, di mana setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target dan disertai indikatornya, yang wajib dipenuhi sebelum 2015.

Kedelapan poin yang tergabung dalam Millenium Development Goals (MDGs) adalah sebagai berikut:¹

1. *Eradicate extreme poverty and hunger/ Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan*

Target :

- a. Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%
- b. Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya.

2. *Achieve universal primary education/ Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua*

Target :

- a. Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

3. *Promote gender equality and empower women/ Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan*

Target :

- a. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia

¹ *Usaha Pencapaian MDGs di Indonesia.* (n.d.). Retrieved Maret 20, 2011, from http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=12

4. *Reduce child mortality*/ Mengurangi Tingkat Kematian Anak

Target :

- a. Mengurangi hingga dua pertiga-nya, tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun

5. *Improve maternal health*/Meningkatkan kesehatan ibu

Target :

- a. Menurunkan $\frac{3}{4}$ -nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia

6. *Combat HIV/AIDS, malaria and other disease*/ Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya

Target :

- a. Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia
- b. Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia.

7. *Ensure environmental sustainability*/ Memastikan Kelestarian Lingkungan

Target :

- a. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serta mengembalikan sumberdaya yang hilang.
- b. Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.

- c. Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh

8. *Develop a global partnership for development*/Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Target :

- a. Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif
- b. Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk ekspor mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.
- c. Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil.
- d. Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.
- e. Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda.
- f. Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang.

- g. Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Dari delapan target tersebut, MDGs nampak sebagai target pembangunan yang wajar dan tidak problematis. Kedelapan tujuan dari MDGs tersebut harus dipenuhi oleh Indonesia, sebagai salah satu negara yang menyepakati dengan adanya MDGs. Bahkan sudah menjadi kewajiban ketika hampir seluruh negara di dunia juga menyepakatinya dan bukan merupakan masalah ketika semua lembaga donor internasional seperti Bank Dunia dan IMF berniat membantu negara-negara tersebut mencapai target MDGs. Tetapi kedelapan target tersebut bukan merupakan bagian yang paling penting dalam MDGs. Kedelapan target tersebut adalah janji pembangunan. Dan semua model pembangunan mempunyai janji yang kurang lebih sama. Tidak ada perbedaan signifikan antara janji pembangunan pada masa awal kemunculannya dengan janji pembangunan selanjutnya, termasuk di dalamnya janji MDGs.

Partisipasi Indonesia dalam Millennium Development Goals memaksa Indonesia untuk memegang komitmen terutama pada rakyat Indonesia dan masyarakat internasional untuk menjamin daya dukung lingkungan hidup dengan target memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang, Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 dan mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020.

Kelestarian lingkungan merupakan masalah paling besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Yang terjadi saat ini adalah, kecepatan kerusakan lingkungan lebih cepat dari pemulihannya. Bahkan, menjamin daya dukung lingkungan hidup merupakan salah satu sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah menunjukkan kecenderungan kemajuan yang baik namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015.

Keadaan dan kecenderungan posisi Indonesia saat ini menunjukkan adanya penurunan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daratan. Luas kawasan hutan tetap di Indonesia berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan tahun 2002 adalah 91,22 juta ha, tidak termasuk tiga provinsi yang masih dalam proses penunjukan (Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah). Berdasarkan penafsiran citra Landsat 7 ETM+ liputan tahun 1999/2000 kawasan hutan tetap seluruh Indonesia adalah seluas 110 juta ha dengan luas kawasan yang masih berhutan adalah 72 juta ha, sedangkan areal yang lain berupa non-hutan dan tidak ada data (tertutup awan). Berdasarkan data Statistik Kehutanan Indonesia tahun 1993 dan 2001, kondisi luas hutan Indonesia telah menyusut dari 130,1 juta ha menjadi 123,4 juta ha.²

Dengan demikian, proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daratan di Indonesia menurun dari 67,68 persen pada 1993 menjadi 64,2 persen pada 2001. Dalam mencapai target MDGs, rasio kawasan tertutup pepohonan maupun hutan

² Tim Penyusun Laporan MDGs Indonesia. (2004). *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia*. Jakarta: Bappenas hal.80

harus meningkat. Tetapi apa yang dicapai oleh negara Indonesia bukannya meningkat tetapi malah menurun. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus dalam tujuan MDGs yang ketujuh ini. Penyusutan luas hutan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain penjarahan hutan, kebakaran, perubahan (konversi) untuk kegiatan pembangunan lain di luar kehutanan seperti untuk pertambangan dan pembangunan jalan, permukiman, dan sebagainya.

Laju deforestasi selama kurun waktu 1985 sampai dengan 1997 untuk bioregion Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua adalah sekitar 1,8 juta ha/tahun. Terjadinya krisis ekonomi dan penerapan otonomi daerah diperkirakan meningkatkan laju deforestasi setelah tahun 1997. Penurunan luas hutan sekaligus juga merupakan penurunan fungsi dan peran ekologis hutan terhadap lingkungan yang akan berakibat pada terjadinya krisis air di masa depan.³

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memberikan dampak amat besar kepada rakyat. Faktor ekonomi salah satu penyebab terjadinya peningkatan deforestasi. Lajunya tingkat deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi dan tidak memikirkan akibat dari penggundulan hutan.

³ Ibid hal.80

Berdasarkan ringkasan status MDGs 2010, Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun kedepan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19 persen (2009). Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menurun dari 20,75 persen pada tahun 1993 menjadi 12,12 persen pada tahun 2009. Diperlukan perhatian khusus, untuk mencapai target MDG pada tahun 2015.⁴

Walaupun secara keseluruhan keempat target dari menjamin daya dukung lingkungan hidup mengalami kemajuan, tetapi belum mencapai target yang ingin dicapai dalam MDGs. Bahkan di antara beberapa target tersebut mengalami kemunduran dan memerlukan perhatian khusus agar tercapai pada tahun 2015 seperti jumlah emisi karbon dioksida yang meningkat dari tahun ke tahun dan juga kawasan hutan di Indonesia yang semakin menipis.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program *MDGs* seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup,

⁴ Tim Penyusun MDGs Indonesia. (2010). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010*. Jakarta: Bappenas hal.7

kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian *MDGs*. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. Tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan *MDGs*.⁵

Selain masalah utang yang terus membelit negara Indonesia, salah satu contoh masalah lain yang harus dihadapi adalah usaha pertambangan di Indonesia. Usaha pertambangan yang paling kentara di Indonesia ini adalah pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua yang mana merupakan salah satu usaha pertambangan terbesar di Indonesia. PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar

⁵ *Sasaran Pembangunan Milenium*. (n.d.). Retrieved Maret 28, 2011, from http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium

AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar.⁶ Tapi yang perlu kita perhatikan bukan hanya jumlah uang yang mengisi kas ke pemerintah Indonesia melainkan kerusakan yang dihasilkan dari usaha pertambangan tersebut.

Menurut perhitungan Freeport sendiri, penambangan mereka dapat menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar kira-kira 6 miliar ton (lebih dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat Terusan Panama). Kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB.⁷ Di sini menunjukkan bahwa hasil limbah yang mereka produksi lebih banyak daripada bahan tambang yang dihasilkan. Mulusnya jalan bagi usaha pertambangan ini disebabkan adanya oknum-oknum TNI yang ikut bekerjasama dengan usaha pertambangan ini.

Dokumen-dokumen Freeport menunjukkan, dari tahun 1998 sampai 2004 Freeport memberikan hampir 20 juta dolar kepada para jenderal, kolonel, mayor dan kapten militer dan polisi, dan unit-unit militer. Setiap komandan menerima

⁶ *Freeport Indonesia*. (n.d.). Retrieved Juni 01, 2011, from http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia

⁷ Ibid

puluhan ribu dolar, bahkan dalam satu kasus sampai mencapai 150.000 dolar, sebagaimana tertera dalam dokumen itu. Dokumen-dokumen itu diberikan kepada *New York Times* oleh seseorang yang dekat dengan Freeport, dan menurut bekas karyawan maupun karyawan Freeport sendiri, dokumen-dokumen itu asli alias otentik. Dalam respon tertulisnya kepada *New York Times*, Freeport menyatakan bahwa perusahaan itu telah mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan undang-undang Amerika Serikat dan Indonesia untuk memberikan lingkungan kerja yang aman bagi lebih dari 18.000 karyawannya maupun karyawan perusahaan-perusahaan kontraktornya. Freeport juga mengatakan tidak punya alternatif lain kecuali tergantung sepenuhnya kepada militer dan polisi Indonesia dan keputusan-keputusan yang diambil dalam kaitannya dengan hubungan dengan pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keamanannya, adalah kegiatan bisnis biasa.⁸

Berdasarkan fakta tersebut, kita dapat melihat betapa lemahnya pemerintah Indonesia dalam usaha melindungi lingkungan hidup di Indonesia. Padahal PT.Freeport hanya merupakan salah satu usaha pertambangan di Indonesia. Masih ada banyak lagi usaha pertambangan-pertambangan lainnya yang berada di Indonesia. Maka dari itu, peran MDGs diharapkan dapat memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup di Indonesia karena MDGs merupakan sebuah deklarasi yang telah disepakati oleh 189 kepala negara.

Bagian paling penting dalam pembangunan adalah bagaimana tujuan pembangunan dapat dicapai. Atau dengan kata lain, cara apa yang paling tepat

⁸ Ibid

untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Dalam MDGs, cara-cara untuk mencapai MDGs ditulis secara resmi dalam laporan yang berjudul *Investing in Development: A Practical Plans to Achieve the Millenium Development Goals*. Laporan ini ditulis oleh sebuah tim bernama *United Nations Millenium Project*. Tim ini dibentuk pada tahun 2003 dan diketuai oleh Jeffrey D. Sachs. Laporan ini selesai ditulis pada tahun 2005 dan disepakati sebagai panduan umum pembangunan untuk mencapai MDGs pada tahun yang sama, ketika 189 negara yang menyetujui MDGs kembali bertemu dalam *World Summit*. Selain *Investing in Development*, cara-cara untuk mencapai MDGs juga banyak ditulis dalam laporan-laporan lembaga donor internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan juga Asian Development Bank.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diajukan di atas, penelitian ini akan membahas peran dengan tujuan MDGs yang ketujuh yaitu dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam penelitian ini juga akan membahas hasil yang telah dicapai oleh Indonesia dalam mencapai program MDGs di bidang lingkungan hidup.

Oleh karena itu, dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan utama yang membantu penelitian ini sebagai berikut;

D. PERUMUSAN MASALAH

Dari pembahasan yang dikemukakan, maka yang ingin diangkat dalam skripsi ini sebagai pokok permasalahan adalah “Bagaimana peran MDGs dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia”.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam menjelaskan suatu fenomena, penulis membutuhkan dasar-dasar atau kerangka berfikir yang akan digunakan untuk membantu penulis dalam menjelaskan fenomena tersebut. Oleh karena itu, kerangka dasar berfikir yang akan digunakan adalah Konsep Rezim Internasional.

Sejak pertengahan tahun 1970-an, konsep rezim internasional banyak digunakan para ahli dalam menganalisa dinamika hubungan internasional. John Rugie mengenalkan konsep itu pada tahun 1975. Menurutnya rezim internasional adalah peraturan, rencana, energi organisasi, dan komitmen finansial secara bersama yang telah dikonsepsi oleh suatu kelompok negara.⁹ Konsep rezim internasional juga telah digambarkan sebagai prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan tersebut digunakan untuk menganalisa isu-isu tertentu oleh aktor hubungan internasional.

Dalam sebuah sistem dunia internasional, rezim internasional merupakan salah satu aspek yang membawa pengaruh besar terhadap adanya suatu stabilitas internasional. Dengan adanya suatu kondisi seperti itu, rezim memiliki keterkaitan dengan adanya sebuah kerjasama. Kerjasama yang akan membuat para aktor atau negara dapat terus bertahan dan mencapai kepentingannya. Kerjasama yang terjadi bukan hanya karena kepentingan bersama yang nantinya akan menciptakan

⁹ James, D., & Robert, P. J. (1990). *Contending Theories of International Relation*. New York: Harper Collins.

sebuah rezim melainkan juga adanya keadaan untuk mempertahankan rezim sehingga tercipta suatu bentuk kerjasama.

Rezim Internasional menurut pengertian dari Stephen D. Krasner adalah suatu tatanan berisi kumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan baik bersifat implisit maupun eksplisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan internasional.¹⁰ Konsep dari rezim internasional merupakan suatu konsep yang kompleks karena didefinisikan dalam empat aspek yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Di mana kesemua aspek tersebut berkaitan tentang perilaku. Fungsi sebagai penghubung yang dimaksudkan di atas bahwa fungsi utama rezim adalah memfasilitasi pembuatan perjanjian kerjasama antara pemerintah atau para aktor. Dalam kalimat ini, aktor bertindak sebagai subjek. Dan memang aktor internasional merupakan subjek sentral dalam rezim internasional, yang umumnya mempertemukan aktor-aktor negara.

Seperti yang dikatakan oleh Stephen D. Krasner, rezim internasional terdiri dari berbagai variable yang akan menjadi faktor penyebab utama untuk melakukan tindakan-tindakan pada bidang tertentu. Pada prinsipnya rezim digambarkan “kepercayaan kepada fakta, yang akan berakibat pada perilaku-perilaku yang jujur oleh berbagai pihak”. Dalam teori rezim terdapat dua variabel yang juga menentukan keberlangsungan suatu rezim yaitu norma dan aturan.

¹⁰ Krasner, S. D. (1983). *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press hal.1

Norma juga adalah sebagai standart perilaku untuk melaksanakan hak dan juga kewajiban. Aturan adalah cara yang spesifik untuk dapat melakukan suatu tindakan.¹¹

Dengan kehadiran rezim internasional memudahkan negara dan aktor internasional lain untuk bekerja sama. Kerja sama ini akan memperlancar usaha mereka untuk memenuhi kepentingan mereka. Rezim lebih dari sesuatu yang independen dalam politik internasional yang berperan sebagai fasilitator terciptanya *agreement* dengan cara menyediakan seperangkat norma, peraturan dan prinsip. Rezim lahir guna menciptakan solusi tersebut untuk menyelesaikan masalah di dalam kompleksitas perilaku anggotanya secara spesifik. Rezim internasional terkadang muncul sebagai reaksi terhadap adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi perilaku berbagai negara tentang suatu isu tertentu.

Menurut Oran R. Young, rezim itu terdiri dari “tindakan institusi sosial pemerintah untuk ditarik pada aktivitas-aktivitas yang khusus (kumpulan-kumpulan aktivitas atau tindakan). Menurut Oran R. Young, rezim terdiri dari institusi sosial yang mengatur tindakan pada aktivitas yang khusus (kesatuan aktivitas)” dengan unsur-unsur inti rezim yang terdiri dari hak dan aturan. Pengaturan struktur memberi peluang kepada para aktor yang tertarik akan aktivitas yang ditentukan. Dan isi yang tepat itu akan merupakan suatu perihal yang menarik untuk para pengikut (masyarakat). Yang termasuk gagasan rezim internasional adalah proses membuat keputusan yang berhubungan dengan

¹¹ James, D., & Robert, P. J., op.cit

aktivitas tertentu. Jadi, konsep rezim meliputi kedua-duanya yaitu struktur rezim dan proses unsur-unsur rezim. Perbedaan yang dibedakan atas pemeriksaan yang memusat pada pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana dan mengapa rezim didirikan; apa organisasinya, struktur format yang mereka gunakan, seperti halnya proses keputusan yang menghasilkan output kebijakan.¹²

Rezim didasarkan pada suatu konsepsi bersama dari para pengikutnya untuk menyusun strategi-strategi khusus. Singkatnya, memerlukan aturan kerjasama dan kesepakatan bersama untuk tujuan tertentu. Rezim diciptakan secara evolusioner atau tindakan sepihak oleh salah satu kelompok yang diterima berbagai kelompok. Aktor yang sudah membentuk suatu rezim akan terlibat dalam yang menurut R.Young “proses perluasan tugas” yang akan memimpin dari waktu ke waktu untuk memunculkan suatu rezim yang lebih komprehensif. Rezim diakibatkan kerjasama yang bersifat sukarela terhadap bidang tertentu. Mereka didasarkan pada kehendak bersama. Rezim menjadi ada sebagai hasil suatu persetujuan atau kontrak bersama di antara pengikutnya (rakyat). Jadi, kelestarian suatu rezim akan ditentukan oleh para pengikutnya. Kesetiaan pengikut terhadap rezim akan membentuk suatu kelestarian yang akan menentukan langgengnya suatu rezim.¹³

Dari penjabaran teori di atas, rezim yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah aturan dan komitmen yang telah dibentuk oleh MDGs demi mencapai sebuah tujuan tertentu. MDGs sebagai sebuah Deklarasi Milenium yang

¹² Ibid

¹³ Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff Jr, R. L. (1990). *Cotending Theories of International Relation*. New York: HarperCollins.

merupakan kesepakatan para Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals-MDGs*) pada tahun 2015. Tujuan MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mengadopsi Deklarasi Millenium dan mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan.

MDGs memiliki delapan target yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari deklarasi millennium tersebut. Salah satu tujuannya adalah melestarikan lingkungan hidup. MDGs telah memiliki andil yang cukup besar dan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Rezim yang diterapkan oleh MDGs ini memiliki pengaruh atau rezim pemerintah Indonesia itu sendiri, dikarenakan MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. MDGs bukan tujuan utama PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. Walaupun begitu, MDGs tetap di bawah pengawasan PBB. Lembaga yang ikut berperan aktif dalam merealisasikan MDGs di negara-negara berkembang adalah *United Nations Development Programme* (UNDP). UNDP merupakan lembaga-lembaga pendamping dan pengawas untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam MDGs. Dengan demikian UNDP sebagai bagian

dari jaringan PBB, menjadi penghubung dan mengkoordinasikan berbagai upaya di tingkat nasional dan global untuk mencapai MDGs.

Dari pemikiran Stephen D. Krasner yang mengatakan bahwa “norma adalah standar dari perilaku untuk melaksanakan hak dan kewajiban, sedangkan aturan adalah resep yang spesifik untuk melakukan tindakan”.¹⁴ Penulis dapat menyimpulkan bahwa, cara terbaik untuk suatu rezim dapat bertahan lama adalah menerapkan norma dan aturan. MDGs menerapkan norma-norma dan aturan-aturan kepada negara yang ikut mendeklarasikan MDGs yang harus dicapai dalam memenuhi target pembangunan milenium termasuk upaya dalam melestarikan lingkungan hidup.

UNDP sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh PBB untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai tujuan MDGs. Maka dari itu, pada tahun 2003 dibentuk suatu tim yang bernama *United Nations Millenium Project* dan diketuai oleh Jeffrey D. Sachs. Tim ini dibentuk untuk merumuskan cara maupun upaya yang dapat ditempuh oleh negara sebagai panduan umum pembangunan untuk mencapai MDGs pada tahun yang sama. Cara-cara untuk mencapai MDGs ditulis secara resmi dalam laporan yang berjudul *Investing in Development: A Practical Plans to Achieve the Millenium Development Goals*. Laporan ini selesai ditulis pada tahun 2005 dan disepakati sebagai panduan umum pembangunan untuk mencapai MDGs pada tahun yang sama, ketika 189 negara yang menyepakati MDGs kembali bertemu dalam *World Summit*.

¹⁴ James, D., & Robert, P. J., op.cit

Dalam laporan tersebut, target yang harus dicapai dalam melestarikan lingkungan hidup ada 3 target yaitu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serta mengembalikan sumberdaya yang hilang, mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 dan mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh minimal 100 juta pada tahun 2020.¹⁵

Jika dilihat dari sisi pemerintah Indonesia, hadirnya MDGs dengan salah satu tujuannya yaitu melestarikan lingkungan hidup ini sangat berpengaruh terhadap setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Sebelum MDGs dideklarasikan, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, seperti yang ditetapkan pada pasal 28H dan 33 UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-2 menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

¹⁵ Project, U. M. (2005). *Investing in Development: A Practical Plans to Achieve the Millenium Development Goals*. . UK and USA: Earthscan.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹⁶

Senada dengan itu, pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, keberlanjutan dan manfaat mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup secara baik dan harmonis.

Selain itu, komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan MDGs dalam melestarikan lingkungan hidup terlihat dari partisipasi Indonesia dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Indonesia memegang peranan yang penting dalam negosiasi perubahan iklim internasional, tidak saja sebagai negara tempat disepakatinya Bali Action Plan (COP-13) namun diplomasi Indonesia diharapkan dapat menjembatani berbagai

¹⁶ *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (2004). Retrieved July 28 , 2011, from <http://www.docstoc.com/docs/7933603/BAB-1---Kebijakan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup>

¹⁷ Ibid

kepentingan terutama antara negara maju dan berkembang. Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK secara nasional sebanyak 26% dari level “business as usual,” pada tahun 2020 atau 41% (bila ada dukungan internasional dalam aksi mitigasi) harus didukung secara positif oleh semua pihak. Peran serta Indonesia secara aktif dan berkelanjutan dalam pertemuan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim yang saat ini makin terasa dampaknya di Indonesia.¹⁸

Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya untuk melestarikan lingkungan hidup memiliki visi dan misi pelestarian lingkungan yang bersifat *sustainable* atau berkelanjutan. Komitmen membentuk setifikasi gaya Indonesia ini adalah salah satu dari agenda visi maupun misi pemerintah Indonesia tersebut. Peran MDGs dalam menjamin daya dukung lingkungan hidup di Indonesia sangat diperlukan mengingat di masa depan, ada empat isu yang menjadi poin utama dalam mewujudkan tatanan pembangunan berkelanjutan dan mengembalikan sumber daya yang hilang, yakni krisis ekonomi dan reformasi, desentralisasi, globalisasi, dan *governance*. Krisis ekonomi memperburuk keadaan ekonomi sepertiga masyarakat di kawasan hutan dan mengakibatkan semakin maraknya penebangan liar. Perubahan dengan adanya reformasi memberikan peluang bagi perbaikan di masa mendatang.

¹⁸ *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. (2010, November). Retrieved July 28, 2011, from <http://www.deptan.go.id/kln/pdf/unfccc.pdf>

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah sekitar tahun 2000 sampai dengan 2010, di mana pada tahun 2000 The Millenium Declaration yang menghasilkan Millenium Development Goals mulai disepakati bersama. Penelitian ini menjadikan tahun 2010 sebagai fokus penelitian. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan akan membahas tahun-tahun sebelumnya untuk dibahas di penelitian ini.

Cakupan lingkungan hidup dalam penelitian ini akan membahas target pertama dari tujuan MDGs dalam melestarikan lingkungan hidup yaitu rasio kawasan hutan di Indonesia dan jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan di Indonesia. Penelitian ini akan membahas peran MDGs dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan melestarikan lingkungan hidup.

G. METODE PENELITIAN

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dipeoleh dengan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara pencarian data yang bersumber dari buku, surat kabar, jurnal, sumber internet dan segala dokumen tertulis yang mempunyai akurasi data yang tepat dijadikan sebagai referensi studi kepustakaan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka yang berisikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Hal tersebut dikarenakan yang tertulis dalam bab ini merupakan dasar atau kerangka pemikiran untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

BAB II MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS SEBAGAI REZIM GLOBAL

Dalam bab ini akan dibahas mengenai MDGs dan sejarahnya. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai MDGs di Indonesia serta Tujuan, Target dan Indikator MDGs Indonesia.

BAB III LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian dari lingkungan hidup. Selain itu, dalam bab ini juga akan membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup di Indonesia mencakup perubahan iklim serta kondisi hutan di Indonesia.

BAB IV PERAN MDGs DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang peran UNDP sebagai lembaga pengawas rezim MDGs di Indonesia. Di dalam bab ini juga akan membahas prinsip, norma

dan aturan yang terkandung di dalam MDGs serta tentang upaya Indonesia dalam mensukseskan MDGs.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dari bab keseluruhan.